

Kepercayaan Publik (*Public Trust*) Terhadap Pemerintah Nagari Dalam Tata Kelola Lingkungan Di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan

^{1*}Novita Permata Sari, ¹Adil Mubarak

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Indonesia

Corresponding Author e-mail: permatasarin273@gmail.com

Received: September 2026; Revised: September 2026; Published: October 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih dalam tata kelola lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposif dari unsur pemerintah nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, kedudukan, dan keterlibatan mereka dalam tata kelola lingkungan. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kepercayaan publik dianalisis menggunakan dimensi kemampuan (*Ability*), kepedulian (*Benevolence*), dan integritas (*Integrity*). Temuan menunjukkan bahwa masyarakat masih melihat adanya upaya pemerintah melalui koordinasi, gotong royong, musyawarah, penyampaian informasi, dan penerimaan keluhan. Namun, kepercayaan belum sepenuhnya kuat karena penanganan sampah rumah tangga belum teratur, kegiatan lingkungan diharapkan lebih rutin, dan tindak lanjut keluhan serta pemerataan informasi masih perlu diperjelas. Faktor yang berkaitan dengan kepercayaan meliputi tindakan nyata pemerintah, komunikasi, respons terhadap keluhan, kapasitas penanganan persoalan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Kepercayaan Publik; Pemerintah Nagari; Tata Kelola Lingkungan; Pengelolaan Sampah; Partisipasi Masyarakat.

How to Cite: Sari, N. P., & Mubarak, A. (2026). Kepercayaan Publik (*Public Trust*) Terhadap Pemerintah Nagari Dalam Tata Kelola Lingkungan Di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Authentic Research*, 5(4), 7295–7309. <https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7015>



<https://doi.org/10.36312/jar.v5i4.7015>

Copyright© 2026, Sari & Mubarak.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Kepercayaan publik merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. OECD (2017) menegaskan bahwa kepercayaan publik berkaitan dengan integritas, responsivitas, dan kapasitas pemerintah dalam menyediakan pelayanan serta menangani persoalan publik. Kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah, tetapi juga dengan penilaian mereka terhadap kemampuan, kepedulian, dan integritas

pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Rizal, 2023). Christensen dan Lægreid (2005) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh kepuasan terhadap layanan, faktor politik, dan karakteristik demografis warga. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat membentuk penilaian melalui pengalaman ketika berinteraksi dengan aparatur, memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan melihat bagaimana persoalan yang mereka hadapi ditangani. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menjelaskan bahwa kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah dapat dipahami melalui tiga dimensi, yaitu *Ability*, *Benevolence*, dan *Integrity*. Ketiga dimensi tersebut mencakup kemampuan organisasi menjalankan tugas, perhatian terhadap kepentingan masyarakat, serta integritas dalam melaksanakan kewenangan (Ismail, 2026). Dengan demikian, kepercayaan publik perlu dipahami melalui pengalaman masyarakat terhadap tindakan pemerintah, bukan hanya berdasarkan pernyataan atau penilaian umum terhadap pemerintah (Rois *et al.*, 2026).

Kepercayaan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah menyampaikan informasi dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan. Sofyani dan Tahar (2021), melalui penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa di Kabupaten Bantul, menemukan bahwa transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat desa. Wirawan dan Yaya (2024) juga menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan keadilan berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa, dengan kepuasan masyarakat sebagai variabel mediasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat. Meskipun demikian, kepercayaan tidak cukup dibangun melalui penyampaian informasi semata. Masyarakat juga membutuhkan tindakan yang dapat diamati, penjelasan yang dapat dipahami, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan (Syaifudin *et al.*, 2026). Oleh karena itu, pengalaman masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana kepercayaan publik terbentuk dan dipertahankan.

Dalam konteks pemerintahan nagari, hubungan antara pemerintah dan masyarakat berlangsung dekat dengan kehidupan sehari-hari. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari memberikan dasar bahwa nagari memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Pemerintah nagari berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk persoalan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan menjadi salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak karena persoalannya tidak selalu dapat diselesaikan melalui tindakan pemerintah saja. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan melibatkan berbagai aktor, kelembagaan, serta bentuk koordinasi dalam pengelolaan sumber daya dan penanganan persoalan lingkungan. Ostrom (1990) juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan aturan, kepercayaan, dan kerja sama antaraktor. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Dalam proses ini, kemampuan pemerintah mengoordinasikan kegiatan, merespons kebutuhan warga, dan membangun kerja sama menjadi bagian penting dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga dengan ketersediaan sarana, mekanisme pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Penelitian Mubarak *et al.* (2024) mengenai pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis nagari di Nagari Sikabau, Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah nagari, dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah. Mubarak *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa model ko-produksi dalam program Nabuang Sarok dapat menjadi alternatif transisi energi dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat perlu didukung oleh kelembagaan dan langkah pengelolaan yang memungkinkan kegiatan berlangsung secara berkelanjutan. Yolanda dan Septianda (2023) menambahkan bahwa prinsip *good environmental governance* penting dalam pengelolaan sampah, termasuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, persoalan lingkungan di tingkat nagari tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Pengalaman masyarakat dalam melihat tindakan pemerintah, memperoleh informasi, dan menyampaikan keluhan juga penting untuk memahami penilaian mereka terhadap pemerintah (Rejeki & Solihin, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tata kelola lingkungan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. GrimmeliKhuisen dan Knies (2017) mengembangkan dimensi kepercayaan terhadap organisasi pemerintah, sedangkan Sofyani dan Tahar (2021) serta Wirawan dan Yaya (2024) mengkaji keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat desa. Lemos dan Agrawal (2006) membahas tata kelola lingkungan sebagai proses yang melibatkan beragam aktor, dan Mubarak *et al.* (2024; 2025) menelaah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis nagari. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan di tingkat nagari dengan menggunakan dimensi *Ability*, *Benevolence*, dan *Integrity* secara terpadu. Posisi penelitian ini adalah mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana masyarakat Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi menilai pemerintah nagari berdasarkan pengalaman mereka dalam pengelolaan sampah, kegiatan lingkungan, penyampaian aspirasi, dan penerimaan informasi.

Alasan pemilihan Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, adalah karena nagari ini menghadapi persoalan pengelolaan sampah rumah tangga yang cukup mendesak, yaitu kebutuhan tempat sampah sekitar 25 unit, sementara sarana yang tersedia hanya satu unit dan berada dalam kondisi rusak, serta belum tersedianya layanan pengangkutan sampah. Kondisi ini menjadikan nagari tersebut relevan untuk mengkaji hubungan antara kemampuan pemerintah, kepedulian, integritas, dan kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, nagari memiliki lembaga nagari dan forum masyarakat yang memungkinkan analisis proses kolaborasi antara pemerintah dan warga.

Signifikansi penelitian ini bagi pemerintah nagari adalah memberikan masukan mengenai aspek kemampuan, kepedulian, dan integritas yang perlu diperkuat dalam tata kelola lingkungan. Bagi lembaga nagari, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperjelas peran penghubung aspirasi dan pemantauan

kebutuhan lingkungan. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan ruang refleksi mengenai partisipasi, penyampaian keluhan, dan pengawasan kegiatan lingkungan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengkaji kolaborasi, anggaran lingkungan, dan keberlanjutan program pengelolaan sampah di tingkat nagari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi dalam tata kelola lingkungan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat menilai kemampuan, kepedulian, dan integritas pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah nagari dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui tindakan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan, penyampaian informasi yang lebih terbuka, dan tindak lanjut yang lebih jelas terhadap aspirasi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami pengalaman, pandangan, dan penilaian informan mengenai hubungan antara Pemerintah Nagari dan masyarakat dalam tata kelola lingkungan (Sugiyono, 2022; Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian berada di Nagari Ganting Mudiak Utara Suranthi, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan perhatian khusus pada Kampung Langgai.

Informan dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kedudukan, dan keterlibatan mereka terhadap tata kelola lingkungan. Informan terdiri atas tujuh orang yang mewakili unsur Pemerintah Nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Informasi dari masing-masing kelompok dibandingkan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kepercayaan publik. Dalam penulisan artikel ini, keterangan informan pemerintah dan lembaga digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah menjelaskan tindakan dan mekanisme yang dijalankan, sedangkan keterangan masyarakat digunakan untuk melihat pengalaman dan penilaian terhadap tindakan tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan mengenai pelaksanaan tata kelola lingkungan, kemampuan pemerintah, kepedulian, integritas, penyampaian informasi, penerimaan keluhan, dan keterlibatan masyarakat (Kvale & Brinkmann, 2009). Observasi dilakukan terhadap kondisi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, kondisi sungai, aktivitas masyarakat, serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan banjir dan potensi longsor (Creswell & Poth, 2018). Data sekunder berupa dokumen pemerintahan nagari, dokumentasi kegiatan, foto, dan sumber tertulis lain digunakan sebagai data pendukung (Bowen, 2009).

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih serta dikelompokkan sesuai fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik berdasarkan tata kelola lingkungan, *Ability*, *Benevolence*, *Integrity*, kepercayaan publik, dan faktor-faktor yang memengaruhi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu perbandingan informasi antarinforman serta perbandingan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi.

Analisis kepercayaan publik menggunakan konsep Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) dengan tiga dimensi utama. *Ability* digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan, menangani persoalan, menerima keluhan, dan mencari penyelesaian. *Benevolence* digunakan untuk melihat perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan kesediaan mendengarkan aspirasi. *Integrity* digunakan untuk melihat keterbukaan informasi, konsistensi tindakan, serta kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Lingkungan di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Kegiatan yang ditemukan meliputi gotong royong, kegiatan kebersihan, penyampaian imbauan, musyawarah, penerimaan aspirasi, dan upaya menangani persoalan lingkungan. Pemerintah Nagari berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, sedangkan lembaga nagari membantu komunikasi dan penyampaian aspirasi kepada masyarakat.

Sekretaris Nagari Raim Putra menjelaskan bahwa kegiatan nagari dilakukan melalui diskusi dan musyawarah bersama lembaga serta tokoh masyarakat. Pemerintah juga melibatkan kelompok yang ada di nagari dalam pelaksanaan kegiatan. Dari sisi lembaga nagari, Bapak Ali Minus sebagai Ketua Bamus menjelaskan bahwa informasi kegiatan lingkungan biasanya disampaikan melalui pertemuan masyarakat atau perangkat nagari. Keterangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme formal dan informal yang digunakan untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.

Pada sisi masyarakat, kegiatan tersebut memang dirasakan. Ibu Tatik menyampaikan bahwa kegiatan kebersihan dan gotong royong telah dilakukan, tetapi kegiatan tersebut perlu lebih sering dilakukan agar kondisi lingkungan tetap terjaga. Ibu Linda juga menilai bahwa kegiatan lingkungan masih perlu diperkuat secara rutin. Perbandingan keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan lembaga nagari mengakui adanya kegiatan serta mekanisme komunikasi, sementara masyarakat mengakui kegiatan tersebut tetapi memberi perhatian lebih besar pada kesinambungan pelaksanaannya.

Persoalan yang paling sering muncul dalam penelitian adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa

pengelolaan sampah belum berjalan secara teratur. Pemerintah telah melakukan kegiatan yang dapat dilaksanakan bersama, seperti gotong royong dan imbauan, tetapi pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang lebih teratur. Ibu Yanti menyampaikan bahwa pemerintah cukup mampu menangani persoalan yang dapat diselesaikan melalui kegiatan masyarakat, tetapi persoalan sampah secara keseluruhan masih membutuhkan penanganan yang lebih teratur. Temuan ini memperlihatkan bahwa tata kelola lingkungan telah berjalan, tetapi belum seluruh persoalan dapat ditangani melalui kegiatan bersama.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dari tata kelola lingkungan. Masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut dalam gotong royong dan kegiatan kebersihan. Keterlibatan tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melihat tindakan pemerintah secara langsung. Pada saat yang sama, masyarakat juga menggunakan forum dan perangkat nagari untuk menyampaikan keluhan. Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat berlangsung melalui kegiatan bersama, komunikasi, dan penyampaian aspirasi.

Pemerintah Nagari memandang kerja sama sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan. Namun, penilaian masyarakat menunjukkan bahwa kerja sama tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan yang lebih rutin dan penanganan persoalan yang lebih teratur. Perbedaan penekanan ini penting dalam memahami kepercayaan publik karena pemerintah melihat proses kerja sama, sedangkan masyarakat menilai pengalaman dan keberlanjutan hasil yang mereka rasakan.

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Lemos dan Agrawal (2006) yang menempatkan tata kelola lingkungan sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dan bentuk koordinasi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor belum cukup jika tidak diikuti oleh keberlanjutan kegiatan, kejelasan tindak lanjut, dan pemerataan informasi. Dengan demikian, tata kelola lingkungan di tingkat nagari tidak hanya persoalan kehadiran forum atau kegiatan bersama, tetapi juga persoalan bagaimana proses tersebut menghasilkan pengalaman yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kemampuan (*Ability*) Pemerintah Nagari

Dimensi *Ability* berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Nagari menjalankan tugas, menggerakkan masyarakat, menangani persoalan lingkungan, menerima keluhan, dan mencari penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah paling terlihat pada kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah dapat mengoordinasikan lembaga dan kelompok masyarakat, menggerakkan gotong royong, serta membuka ruang untuk penyampaian persoalan.

Keterangan pemerintah dan lembaga nagari menunjukkan adanya mekanisme koordinasi. Raim Putra menjelaskan bahwa KSB, LPMN, dan Bamus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian kebutuhan masyarakat. Bapak Ali Minus juga menjelaskan bahwa masyarakat diberitahu apabila terdapat kegiatan gotong royong atau kegiatan lingkungan. Dari sisi masyarakat, Ibu Yanti dan Ibu Tatik menilai pemerintah cukup mampu, terutama dalam menggerakkan masyarakat. Ibu Linda memberikan penilaian yang lebih berhati-hati dengan menyatakan bahwa kemampuan sudah ada, tetapi masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Perbandingan keterangan tersebut memperlihatkan pola yang relatif sama. Pemerintah menjelaskan kemampuan dari sisi proses koordinasi dan pelibatan,

sedangkan masyarakat mengakuinya terutama pada kegiatan yang mereka lihat secara langsung. Pada saat yang sama, masyarakat memberikan batasan bahwa kemampuan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan lingkungan yang membutuhkan sarana, anggaran, dan perencanaan. Pengelolaan sampah menjadi contoh paling jelas karena membutuhkan penanganan yang lebih teratur daripada kegiatan gotong royong yang dilakukan pada waktu tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa *Ability* dalam kepercayaan publik bersifat kontekstual. Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) menempatkan kemampuan sebagai salah satu dimensi kepercayaan, tetapi penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan tidak cukup dinilai dari keberhasilan menggerakkan warga. Kemampuan juga dinilai dari kapasitas menyediakan sarana, merencanakan sistem, dan menjaga keberlanjutan penanganan persoalan. Mubarak *et al.* (2024) menegaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis nagari membutuhkan dukungan kelembagaan dan kerja sama lintas pihak. Karena itu, kemampuan pemerintah nagari perlu dilihat sebagai kombinasi antara koordinasi sosial dan kapasitas teknis-administratif.

Keterbatasan kemampuan teknis ini sejalan dengan temuan Widiasih *et al.* (2024) bahwa implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah menghadapi tantangan kapasitas, koordinasi, dan dukungan sumber daya. Dalam konteks nagari, keterbatasan sarana dan anggaran menjadi faktor yang membatasi sejauh mana kemampuan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat.

Kepedulian (*Benevolence*) Pemerintah Nagari

Benevolence berkaitan dengan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, kepedulian dilihat melalui keterlibatan pemerintah dalam kegiatan lingkungan, kesediaan mendengarkan masyarakat, penerimaan aspirasi, dan respons terhadap keluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya perhatian pemerintah melalui kegiatan bersama dan komunikasi langsung.

Bapak Jul Hendri sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwa pemerintah cukup terlibat dalam kegiatan lingkungan, termasuk mengajak masyarakat melakukan gotong royong dan memberikan arahan mengenai kebersihan. Dari sisi masyarakat, Ibu Masni menyatakan bahwa pemerintah terlihat cukup peduli karena masih melibatkan masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Ibu Yanti juga menjelaskan bahwa ketika ada keluhan, pemerintah biasanya memberikan tanggapan dan menyampaikan bahwa persoalan akan dibicarakan atau ditindaklanjuti.

Namun, kepedulian tidak hanya dinilai dari adanya respons awal. Ibu Tatik menyampaikan bahwa kegiatan kebersihan dan gotong royong memang ada, tetapi perlu dilakukan lebih sering agar lingkungan tetap terjaga. Ibu Linda juga mengharapkan kegiatan lingkungan dilakukan secara rutin. Artinya, masyarakat menilai kepedulian melalui kehadiran dan keberlanjutan tindakan, bukan hanya melalui komunikasi ketika persoalan sudah muncul.

Perbandingan informasi menunjukkan bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat melihat keterlibatan sebagai bentuk perhatian, sedangkan masyarakat menambahkan unsur keberlanjutan dan tindak lanjut. Masyarakat merasa diperhatikan ketika keluhan diterima dan pemerintah bersedia membicarakannya, tetapi tingkat kepedulian yang dirasakan menjadi lebih kuat ketika ada tindakan

lanjutan yang dapat dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa *Benevolence* berkaitan erat dengan pengalaman interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Temuan ini memperkuat argumen Mayer *et al.* (1995) bahwa kepercayaan terbentuk dari penilaian terhadap kemampuan, kebaikan hati, dan integritas pihak yang dipercaya. Namun, dalam konteks nagari, *Benevolence* tidak hanya bersifat sikap, tetapi juga harus tampak dalam praktik rutin. Masyarakat tidak cukup melihat pemerintah menerima keluhan; mereka juga ingin melihat kehadiran, keberlanjutan kegiatan, dan tindak lanjut yang jelas. Karena itu, kepedulian perlu dirawat melalui mekanisme yang konsisten, bukan hanya melalui respons insidental.

Integritas (*Integrity*) Pemerintah Nagari

Integrity dalam penelitian ini berkaitan dengan keterbukaan informasi, konsistensi pelaksanaan kegiatan, dan kesesuaian antara informasi yang disampaikan pemerintah dengan tindakan yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari telah menggunakan beberapa saluran komunikasi, seperti pertemuan masyarakat, perangkat nagari, baliho, dan forum masyarakat. Saluran tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan.

Bapak Ali Minus menjelaskan bahwa informasi mengenai kegiatan gotong royong dan kegiatan lingkungan biasanya disampaikan melalui pertemuan masyarakat atau perangkat nagari. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi tersedia. Namun, masyarakat tidak selalu mengetahui seluruh kegiatan pemerintah. Ibu Yanti menyampaikan bahwa ia mengetahui beberapa kegiatan seperti gotong royong dan kegiatan kebersihan, tetapi tidak mengetahui seluruh program secara keseluruhan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan saluran informasi belum otomatis membuat seluruh informasi diterima secara merata. Bagi masyarakat, keterbukaan informasi juga berkaitan dengan mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah, persoalan apa yang sedang ditangani, dan bagaimana perkembangan tindak lanjutnya. Karena itu, pemerataan informasi menjadi salah satu bagian yang berkaitan dengan *Integrity*.

Integritas juga terlihat dari konsistensi kegiatan. Masyarakat mengakui adanya kegiatan kebersihan dan gotong royong, tetapi berharap kegiatan dilakukan lebih rutin. Konsistensi menjadi penting karena masyarakat membentuk penilaian berdasarkan pengalaman berulang. Apabila kegiatan hanya dilakukan pada waktu tertentu, masyarakat dapat melihat adanya tindakan, tetapi belum tentu melihat pola pengelolaan yang berkelanjutan.

Tindak lanjut keluhan juga berkaitan dengan *Integrity*. Pemerintah menerima dan membicarakan keluhan masyarakat, tetapi waktu penyelesaian berbeda sesuai dengan jenis persoalan. Persoalan yang membutuhkan anggaran atau koordinasi membutuhkan proses lebih panjang. Dalam kondisi tersebut, kejelasan informasi mengenai proses tindak lanjut menjadi penting agar masyarakat mengetahui alasan dan perkembangan penanganan persoalan.

Dengan demikian, pada dimensi *Integrity* terdapat unsur yang telah berjalan dan unsur yang masih perlu diperkuat. Penyampaian informasi dan penerimaan aspirasi telah tersedia, sedangkan pemerataan informasi, konsistensi kegiatan, dan kejelasan tindak lanjut menjadi perhatian masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa integritas dalam konteks penelitian tidak hanya berkaitan dengan kejujuran

penyampaian informasi, tetapi juga dengan konsistensi tindakan dan keterbukaan mengenai proses penanganan persoalan.

Temuan ini sejalan dengan Sofyani dan Tahar (2021) serta Wirawan dan Yaya (2024) yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai faktor penting dalam kepercayaan masyarakat desa. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi formal melalui baliho, pertemuan, atau perangkat nagari belum cukup apabila informasi tidak merata dan tindak lanjut tidak jelas. Integritas publik terbentuk ketika pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjelaskan proses, alasan, dan perkembangan penanganan persoalan secara konsisten.

Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Nagari

Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih terbentuk dari pengalaman masyarakat ketika mengikuti kegiatan lingkungan, menerima informasi, menyampaikan keluhan, dan melihat tindakan pemerintah. Berdasarkan tiga dimensi yang digunakan, masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada pemerintah karena melihat adanya usaha dan tindakan dalam tata kelola lingkungan. Namun, kepercayaan tersebut belum sepenuhnya kuat karena masyarakat masih mengharapkan perbaikan pada beberapa aspek.

Pada dimensi *Ability*, masyarakat mengakui kemampuan pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan menjalankan kegiatan bersama. Pada dimensi *Benevolence*, masyarakat merasakan perhatian pemerintah melalui gotong royong, penerimaan aspirasi, dan tanggapan terhadap keluhan. Pada dimensi *Integrity*, masyarakat melihat adanya saluran informasi dan mekanisme penyampaian keluhan, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemerataan informasi, konsistensi kegiatan, dan kejelasan tindak lanjut.

Keterangan dari Pemerintah Nagari, lembaga nagari, tokoh masyarakat, dan masyarakat memperlihatkan bahwa kepercayaan publik tidak terbentuk hanya dari pernyataan pemerintah. Pemerintah menjelaskan mekanisme kerja sama dan musyawarah, lembaga nagari menjelaskan penyampaian informasi dan aspirasi, sedangkan masyarakat memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung. Perbandingan tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan penekanan. Titik temunya adalah bahwa kegiatan dan komunikasi memang berlangsung; perbedaannya terletak pada sejauh mana masyarakat melihat kegiatan tersebut berlangsung secara rutin dan menghasilkan tindak lanjut yang jelas.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Grimmelikhuijsen dan Knies (2017) bahwa kepercayaan warga terhadap organisasi pemerintah berkaitan dengan karakteristik yang dinilai masyarakat. Dalam penelitian ini, karakteristik tersebut terlihat melalui kemampuan pemerintah, perhatian terhadap masyarakat, serta integritas dalam menjalankan dan mengomunikasikan kegiatan. Kepercayaan kemudian berkembang melalui pengalaman interaksi yang berulang antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, kepercayaan publik dalam penelitian ini bukan sekadar hasil penilaian atas citra pemerintah, melainkan hasil akumulasi pengalaman warga. Pengalaman tersebut mencakup apakah kegiatan berjalan rutin, apakah informasi sampai secara merata, apakah keluhan ditindaklanjuti, dan apakah pemerintah hadir

dalam persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik bersifat prosedural dan dapat menguat atau melemah seiring konsistensi tindakan pemerintah.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepercayaan Publik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan kepercayaan publik. Pertama, tindakan nyata pemerintah dalam kegiatan lingkungan. Gotong royong, kegiatan kebersihan, imbauan, penerimaan aspirasi, dan upaya penanganan persoalan menjadi pengalaman yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Kegiatan yang nyata membuat masyarakat memiliki dasar pengalaman dalam menilai pemerintah.

Kedua, komunikasi dan penyampaian informasi. Informasi disampaikan melalui perangkat nagari, pertemuan masyarakat, baliho, dan forum masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui keseluruhan kegiatan. Karena itu, kejelasan dan pemerataan informasi menjadi bagian penting dalam hubungan pemerintah dan masyarakat. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Sofyani dan Tahar (2021) yang menempatkan transparansi sebagai bagian penting dalam hubungan pemerintah desa dengan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, tindak lanjut terhadap keluhan. Masyarakat tidak hanya memperhatikan apakah keluhan diterima, tetapi juga melihat tindakan setelah keluhan disampaikan. Keluhan yang memperoleh respons dan perkembangan penanganan memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan keluhan yang belum jelas tindak lanjutnya. Keempat, kemampuan menangani persoalan lingkungan, khususnya sampah rumah tangga. Persoalan sampah menjadi pengalaman masyarakat dalam menilai kemampuan pemerintah karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

Kelima, keterlibatan masyarakat. Gotong royong, musyawarah, penyampaian aspirasi, dan kegiatan lingkungan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan perspektif *Collaborative Governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor dalam proses bersama (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menjadi pengalaman yang membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Tindakan pemerintah membutuhkan komunikasi agar diketahui masyarakat; komunikasi membutuhkan tindak lanjut agar memiliki makna dalam pengalaman masyarakat; kemampuan menangani persoalan menentukan bagaimana tindakan tersebut dirasakan; dan keterlibatan masyarakat menyediakan ruang interaksi yang mempertemukan pemerintah dengan warga. Oleh karena itu, kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Faktor-faktor ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi, transparansi, dan kapasitas penyelesaian masalah.

Faktor-faktor tersebut memperkuat temuan Christensen dan Lægreid (2005) bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berkaitan dengan kepuasan layanan dan faktor politik, serta temuan Wirawan dan Yaya (2024) bahwa akuntabilitas, transparansi, dan keadilan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Namun,

penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks nagari, kedekatan hubungan pemerintah-warga membuat faktor pengalaman langsung dan keberlanjutan tindakan menjadi sangat penting.

Perspektif Tata Kelola Lingkungan dan *Collaborative Governance*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih tidak hanya dilakukan melalui tindakan pemerintah, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pemahaman *environmental governance* yang menempatkan pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari proses pengelolaan lingkungan. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan bahwa *environmental governance* berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lingkungan yang melibatkan berbagai aktor. Dalam penelitian ini, proses tersebut terlihat melalui gotong royong, musyawarah, penyampaian aspirasi, dan kegiatan kebersihan.

Perspektif *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) juga membantu menjelaskan hubungan tersebut. Pemerintah menyediakan ruang untuk musyawarah dan melibatkan lembaga serta masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan partisipasi melalui kegiatan bersama dan penyampaian persoalan. Meskipun demikian, kolaborasi belum hanya diukur dari adanya pertemuan atau kegiatan bersama. Keberlanjutan kegiatan, kejelasan tindak lanjut, dan pemerataan informasi tetap menjadi bagian yang menentukan pengalaman masyarakat.

Jika dikaitkan dengan public trust, kolaborasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat proses pemerintahan secara langsung. Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pemerintah merespons persoalan, bagaimana lembaga nagari menyampaikan aspirasi, dan bagaimana keputusan atau kegiatan dilaksanakan. Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar pembentukan kepercayaan. Dengan demikian, tata kelola lingkungan dan public trust memiliki hubungan melalui pengalaman interaksi antara pemerintah dan masyarakat, meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur hubungan secara statistik.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa *collaborative governance* tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik. Kolaborasi perlu disertai kapasitas pemerintah untuk menindaklanjuti persoalan, transparansi informasi, dan konsistensi kegiatan. Yuniardi *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan dapat menghadapi tantangan ketika aspek lingkungan dan pelaku usaha tidak seimbang; dalam konteks nagari, tantangan serupa terlihat dari keterbatasan sarana dan anggaran. Rosika dan Frinaldi (2023) serta Zulfia dan Frinaldi (2022) menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan inovasi organisasi publik; kedua hal tersebut relevan untuk memperkuat kapasitas nagari dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

Ringkasan temuan berdasarkan tiga dimensi kepercayaan publik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan temuan kepercayaan publik berdasarkan tiga dimensi

Dimensi	Indikator yang Dikaji	Ringkasan Temuan	Implikasi terhadap Kepercayaan
<i>Ability</i> (kemampuan)	Koordinasi, pelaksanaan	Pemerintah dinilai mampu	Kepercayaan didukung oleh

	kegiatan, dan penyelesaian persoalan lingkungan	mengoordinasikan kegiatan dan gotong royong, tetapi penanganan sampah masih terkendala fasilitas dan sistem layanan.	kemampuan koordinasi, namun belum sepenuhnya kuat dalam penyelesaian masalah.
<i>Benevolence</i> (kepedulian)	Kesediaan mendengar aspirasi dan melibatkan masyarakat	Ada upaya mengajak masyarakat terlibat dan menerima keluhan, tetapi warga mengharapkan perhatian serta kegiatan yang lebih rutin.	Kepedulian dirasakan, tetapi perlu dibuktikan melalui tindak lanjut yang konsisten.
<i>Integrity</i> (integritas)	Keterbukaan informasi, konsistensi tindakan, dan tindak lanjut	Informasi disampaikan melalui pertemuan atau komunikasi setempat, namun pemerataan informasi dan kejelasan tindak lanjut masih perlu diperkuat.	Konsistensi dan transparansi penting untuk menjaga kepercayaan warga.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian dilakukan pada satu nagari sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke nagari lain. Kedua, jumlah informan terbatas pada tujuh orang yang mewakili unsur pemerintah, lembaga, tokoh, dan masyarakat; meskipun data diperkuat melalui triangulasi, pandangan kelompok lain yang tidak terwawancara dapat berbeda. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan pengalaman dan penilaian informan daripada pengukuran kuantitatif, sehingga tidak dapat menunjukkan besaran pengaruh antarvariabel. Keempat, dokumen dan data anggaran yang tersedia terbatas, sehingga analisis mengenai kapasitas fiskal nagari dalam pengelolaan sampah belum dapat dilakukan secara mendalam. Kelima, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja pemerintah nagari secara menyeluruh, melainkan memahami kepercayaan publik dalam konteks tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas lokasi, menambah informan, dan menggabungkan pendekatan kualitatif serta kuantitatif.

KESIMPULAN

Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih dalam tata kelola lingkungan berada pada kondisi cukup baik, tetapi belum sepenuhnya kuat. Masyarakat masih melihat adanya upaya pemerintah melalui koordinasi dengan lembaga nagari, kegiatan gotong royong, musyawarah, penyampaian informasi, dan penerimaan keluhan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat serta kegiatan bersama menjadi modal penting bagi kepercayaan publik.

Pada dimensi *Ability*, pemerintah dinilai cukup mampu menggerakkan masyarakat dan mengoordinasikan kegiatan, tetapi pengelolaan sampah masih membutuhkan penanganan yang lebih sistematis. Pada dimensi *Benevolence*, perhatian pemerintah terlihat dari pelibatan masyarakat dan kesediaan

mendengarkan keluhan, meskipun warga mengharapkan kegiatan yang lebih rutin serta kehadiran langsung di lapangan. Pada dimensi *Integrity*, penyampaian informasi dan tanggapan terhadap keluhan telah dilakukan, tetapi pemerataan informasi, konsistensi kegiatan, dan kejelasan tindak lanjut masih perlu diperkuat.

Faktor utama yang memengaruhi kepercayaan publik meliputi tindakan nyata pemerintah, komunikasi dan keterbukaan informasi, respons terhadap keluhan, kemampuan menangani persoalan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat. Sintesis makna temuan ini adalah bahwa kepercayaan publik dalam tata kelola lingkungan nagari tidak hanya dibentuk oleh program atau pernyataan pemerintah, tetapi oleh pengalaman warga yang melihat, merasakan, dan mengevaluasi konsistensi tindakan pemerintah. Kepercayaan bersifat prosedural: ia tumbuh ketika kegiatan berjalan rutin, informasi sampai secara merata, keluhan ditindaklanjuti, dan masyarakat dilibatkan secara bermakna. Sebaliknya, kepercayaan dapat melemah ketika pemerintah hanya hadir pada momen tertentu atau ketika tindak lanjut tidak jelas. Dengan demikian, penguatan kepercayaan perlu diarahkan pada perbaikan pengelolaan sampah yang lebih teratur, penyampaian informasi yang jelas, penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut keluhan, dan pelaksanaan kegiatan lingkungan secara berkelanjutan.

REKOMENDASI

Pemerintah Nagari disarankan menyusun langkah penanganan sampah yang lebih teratur sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran, termasuk memperjelas kebutuhan sarana, mekanisme pengumpulan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara merata serta memberikan pembaruan mengenai status keluhan agar masyarakat mengetahui proses tindak lanjut. Lembaga nagari dapat terus berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dan membantu memantau kebutuhan lingkungan. Masyarakat diharapkan tetap terlibat dalam musyawarah dan kegiatan lingkungan, sekaligus menyampaikan masukan secara konstruktif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih rinci mekanisme kolaborasi, dukungan anggaran, dan pelaksanaan program lingkungan agar faktor-faktor yang memperkuat kepercayaan publik dapat dipahami secara lebih mendalam.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Christensen, T., & Lægreid, P. (2005). Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography. *Public Performance & Management Review*, 28(4), 487–511. <https://doi.org/10.1080/15309576.2005.11051848>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.

- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Ismail, I. (2026). The Capability Paradox: When Competence Becomes a Risk in Public Leadership: Paradoks Kapabilitas: Ketika Kompetensi Menjadi Risiko dalam Kepemimpinan Publik. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 517-541. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v10i2.291>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Sage.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297–325. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Mubarak, A., Frinaldi, A., Syamsir, Sylondra, D. F., Fitriyanti, W., & Rezeki, A. P. T. (2024). Community involvement in the development of nagari-based sustainable waste management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1414, 012082. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1414/1/012082>
- Mubarak, A., Saputra, B., Jumiati, J., & Fadli, I. (2025). From waste to energy: A co-production model for energy transition through the Nabuang Sarok program in West Sumatra, Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 671, 04004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567104004>
- OECD. (2017). *Trust and public policy: How better governance can help rebuild public trust*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264268920-en>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Rizal, G. S. (2023). Peran ASN Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik melalui Ruang Komunikasi Publik. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2). <http://dx.doi.org/10.31602/jm.v6i2>
- Rejeki, I. S., & Solihin, I. (2026). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik berbasis digital untuk mewujudkan tata kelola transparan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 7152-7165. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4459>
- Rois, N., Sari, A. R., & Tuhumury, H. (2026). Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 23828-23839. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6066>
- Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Padang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(9), 1–10. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i09.587>

- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaifudin, A., Khoiron, K., & Ningtias, M. A. (2026). Strengthening Village Participation Through Public Information Literacy And Citizen Oversight: Penguatan Partisipasi Masyarakat Desa Melalui Literasi Informasi Publik Dan Kontrol Warga. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(4), 1435–1446. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v10i4.35519>
- Widiasih, S., Julina, F., & Sekarsari, D. (2024). Tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan lingkungan di pemerintahan daerah. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(11), 46–51. <https://doi.org/10.71040/irpia.v9i11.267>
- Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan keadilan terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa: Apakah kepuasan masyarakat memediasi? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87–104. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20334>
- Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan prinsip good environmental governance dalam pengelolaan sampah pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19026>
- Yuniardi, R., Suharyanto, Y., & Satory, A. (2024). Dampak penyederhanaan perizinan lingkungan yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup masyarakat serta pelaku usaha. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 160–177. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9988>
- Zulfia, H., & Frinaldi, A. (2022). Urgensi penerapan budaya inovasi bagi ASN dalam meningkatkan kinerja organisasi publik dalam mewujudkan reformasi birokrasi. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.17555>